

PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Ahmad Sholikin

Pengajar FISIPOL Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
Jalan Airlangga 3 Sukodadi Lamongan

Email : akhmad.sholikin@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap netralitas Organisasi Sosial Keagamaan seperti Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral. Dalam tulisan ini penulis mengambil dua point utama yang dibahas, *pertama* tentang Bagaimana bentuk netralitas politik elektoral Muhammadiyah. *Kedua* adalah mengapa terjadi deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik islam, yang membagi pemikiran Islam tentang politik kedalam beberapa varian, beserta bagaimana mereka melakukan aksi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah mendasarkan semua keputusannya pada khittah politik Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegal terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. *Faksionalisasi* dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.

Kata Kunci: Politik Elektoral Muhammadiyah, Faksionalisasi Elite, Politik lokal, Organisasi Sosial Keagamaan

PENDAHULUAN

Pernyataan Din Syamsudin yang menegaskan bahwa dalam pemilihan presiden, Muhammadiyah secara organisasi dan kelembagaan berada pada posisi tidak mendukung capres tertentu. Dalam Pilihan Presiden 2014 warga Muhammadiyah diberikan kebebasan

untuk menentukan pilihan secara cerdas dan bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan tujuh kriteria yang diputuskan dalam sidang tanwir di Samarinda.¹

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan memiliki kepentingan untuk mempertahankan sikap modernitasnya, yang dalam kegiatan politik praktis sikap modernitas tersebut diterjemahkan dalam netralitas politik Muhammadiyah dengan politik praktis dari masa ke masa. Netralitas sikap politik Muhammadiyah yang ditunjukkan oleh Din Syamsudin tersebut mendapatkan respons yang berbeda dari dua tokoh Muhammadiyah lainnya, yang keduanya juga merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ahmad Syafii Maarif disisi lain memuji Jokowi sebagai tokoh yang dibutuhkan Indonesia. Menurut Buya Syafii Jokowi adalah orang yang sangat sederhana dan perbuatannya bukan pencitraan. Selain itu Syafii bertitip pesan kepada Jokowi agar kembali menerapkan Trisakti Sukarno. Optimisme Syafii terhadap Jokowi adalah terkait dengan mirisnya kekayaan Indonesia yang dikuasai orang asing dan juga "londo ireng" atau orang Indonesia yang berlagak seperti pemodal asing.² Sedangkan ditempat lain Amien Rais ketika menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah di Samarinda berteriak, "Hidup Prabowo-Hatta", yang dilanjutkan dengan takbir. Setelah itu dia bernyanyi, "Prabowo siapa yang punya? Prabowo siapa yang punya", yang diikuti oleh tim sukses Prabowo.³

Dalam merespons sebuah isu-isu tertentu, para elite Muhammadiyah sering mengalami perbedaan dan silang pendapat. Pernyataan diatas semakin menguatkan bahwa di dalam tubuh Muhammadiyah terdapat faksi-faksi yang selalu berhadapan dan saling berbeda, faksi politis vs faksi non politis, faksi kultural vs faksi kultural, bahkan dalam pemikiran Islam pun terdapat perbedaan yaitu, faksi progresif dan faksi konservatif. Perpecahan dalam tubuh sebuah organisasi merupakan sesuatu yang biasa, apalagi ketika melihat semakin banyaknya partai-partai politik yang mengalami perpecahan dalam akhir-akhir ini.

Fakta bahwa elite dalam tubuh internal Muhammadiyah mengalami perbedaan pendapat sehingga akan mempengaruhi tentang bagaimana sikap politik Muhammadiyah dalam setiap moment politik elektoral dan selalu dituntut untuk berubah.

¹ Din Syamsudin, Muhammadiyah Tak Dukung Salah Satu Capres dalam Pikiran Rakyat Online (Selasa, 27/05/2014 - 14:57 Wib)

² Syafii Maarif : Jokowi Krempeng Tapi punya otak besar dalam pemilu.tempo.com (Sabtu, 03 Mei 2014, 11:18 Wib)

³ Din Pertanyakan Sikap Ekstrem Amien Rais dalam pemilu.tempo.com (Minggu, 25 Mei 2014, 12:50 Wib)

Ditengah terjadinya berbagai perbedaan pandangan tersebut, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang sudah berumur lebih tua dari bangsa Indonesia, selalu menunjukkan eksistensi nya dalam melintasi abad kedua tersebut. Hal ini tidak mengejutkan untuk Kim Hyung-Jun Profesor Antropologi Budaya Kangwon National University Korea Selatan peneliti Muhammadiyah, dalam kesimpulan penelitiannya tentang Muhammadiyah dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada rahasia yang susah dipahami di balik satu abad Muhammadiyah. Apa yang berada di baliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egalitarianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.⁴

Studi ini berfokus pada perbedaan pandangan politik elite Muhammadiyah serta memahami bagaimana implikasinya terhadap sikap politik elektoral Muhammadiyah di daerah yang terepresentasi pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Pasca reformasi, Indonesia mengalami proses transisi demokrasi menuju tahapan konsolidasi yang melahirkan anomali-anomali tertentu, seperti situasi politik yang tidak menentu (*chaos*), fragmentasi sipil, faksionalisasi elite serta militer yang frustrasi dikarenakan merasa terpojok atas perannya mendukung regime masa lalu dan kondisi ini ditambah dengan aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk (Nugroho : 2001).

Kondisi konsolidasi demokrasi yang tidak kunjung menemukan bentuk ideal tersebut membuat sikap dari berbagai elite Muhammadiyah di level lokal berbeda-beda. Sehingga terjadi deviasi kebijakan politik Muhammadiyah, pada level Nasional Muhammadiyah secara organisasi menyatakan dirinya netral dalam politik elektoral, sedangkan di level daerah Muhammadiyah memiliki kecenderungan untuk melakukan aksi dukungan formal terhadap calon kader Muhammadiyah dalam Pilkada. Sambutan yang berbeda dari para elite lokal Muhammadiyah di Sleman dan Maros dalam menyambut Pilkada. Pada tahun 2010, secara terang-terangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman memobilisasi dukungan politik bagi pasangan Sri Purnomo dan Yuni Satia yang diusung oleh Partai gabungan PAN, PDI-P, dan Gerindra dan berhasil meraih suara terbanyak 174.571 suara (35,18%). Sedangkan di Kabupaten Maros pada Pilkada 2010 sikap Pimpinan Daerah Muhammadiyah secara tersirat memberikan himbauan untuk memperjuangkan dan memilih kandidat yang berlatar belakang Muhammadiyah, dan dukungan tersebut mengarah kepada

⁴ Kim Hyung-Jun, Rahasia Se Abad Muhammadiyah dalam Nasional.kompas.com, di akses <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/05/09543790/Rahasia.Satu.Abad.Muhammadiyah> (Senin, 5 Juli 2010 | 09:54 WIB)

pasangan M.M. Hatta Rahman dan Andi Hamril Mattotorang tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 66.138 suara (38,62%) (Nurmandi, Priatno, Efendi : 2015)

Beberapa argument tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain, *pertama*, pertanyaan mendasar yang sangat mengganggu terkait optimisme kelompok *civil society* dalam upaya membangun konsolidasi demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, kelompok-kelompok *Civil Society Organization* seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu gagal dalam mengusung kandidat dalam kontes politik elektoral khususnya pemilihan presiden dalam menghasilkan rezim politik yang 'lebih baik'. Apakah memang elit-elit ormas ini sudah kehilangan *marwah*, atau mesin organisasi ini telah lumpuh diterjang oleh badai liberalisme politik yang didorong oleh partai politik, tim sukses dan tentu saja para pemodal yang berkuasa dibalik kemenangan-kemenangan dramatis dalam politik elektoral. Atau apakah faksionalisasi politik kelompok santri ini semakin membingungkan basis massanya? Ini merupakan beberapa pertanyaan kunci dalam studi ini.

Kedua, karena setelah pasca reformasi studi-studi tentang politik islam lebih mengarah kepada studi-studi Islam radikal dan juga Islam liberal. Sehingga "Islam Moderat" yang berada dibawah dua payung besar Nahdlatul Ulama (NU), yang biasa disebut "tradisionalis", yang mengklaim memiliki 40 juta umat, dan Muhammadiyah, yang biasa disebut "modernis" yang mengklaim memiliki 30 juta umat.⁵ Walaupun dengan kondisi yang pasang-surut tersebut NU dan Muhammadiyah tetap sebagai kekuatan *civil society* yang dapat meredam radikalisme Islam yang muncul bersamaan dengan keterbukaan sosial politik era reformasi. Sehingga kedua organisasi ini selalu menarik untuk diteliti, karena NU dan Muhammadiyah selalu diharapkan untuk memproduksi pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan progresif. Dari sini kemudian NU dan Muhammadiyah mengkader para pendukungnya untuk memasuki lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, baik itu pendidikan, sosial, politik, ekonomi maupun keagamaan. Berbeda dengan pendukung Islam Radikal, pendukung NU dan Muhammadiyah relatif memiliki daya sebar yang tinggi sehingga mereka mengisi seluruh kawasan Indonesia, sampai ke desa-desa.⁶

⁵ lihat Angela Rabasa, et.all, *Building Moderate Muslim Networks* (Santa Monica, CA: The RAND Corporation), h. 105-112, bab "The Southeast Asian Pillar of the Network".

⁶ Jamhari dan Jajang Jahroni (peny.), *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 235.

Ketiga, ketika berbicara tentang faksionalisme yang ada dalam partai politik sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebagaimana dilakukan oleh Arya Bima (2006) dalam disertasinya yang berjudul “*Beyond formal politics: Party factionalism and leadership in post-authoritarian Indonesia*” disertasi ini melihat tentang bagaimana faksionalisasi elite ditubuh partai Golkar, PAN dan PDI-P. Hal yang lain dilakukan oleh Arif Munandar (2011) dalam disertasinya yang berjudul “Antara Jemaah dan Partai politik: Dinamika habitus kader partai keadilan sejahtera (PKS) dalam arena politik Indonesia pasca Pemilu 2004”. Hal ini menunjukkan bahwa faksionalisme didalam tubuh partai politik merupakan fenomena yang sudah biasa, tetapi ketika mendiskusikan tema faksionalisasi dalam konteks Muhammadiyah belum banyak penelitian yang membahasnya. Sehingga penulis ingin menganalisis terkait faksionalisasi yang terjadi di internal Muhammadiyah dalam Pilpres 2014 dan mencari penyebab faksionalisasi tersebut. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimana implikasi dari adanya perbedaan (faksionalisasi) tersebut dalam konteks perpolitikan Muhammadiyah di Indonesia.

Banyak argumen yang menjelaskan tentang bagaimana sikap politik Muhammadiyah yang tidak kunjung menemui sebuah konsep yang baku, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa dengan konsep netralitasnya tersebut Muhammadiyah akan dapat dengan mudah bisa masuk ke sendi-sendi perpolitikan tanpa terbebani oleh nama besar jamaah Muhammadiyah. Disisi lain ada yang mengatakan bahwa dengan konsep netralitas tersebut justru membuat Muhammadiyah tidak dipandang dalam perpolitikan nasional, karena dalam konteks politik berapa yang kamu berikan, maka itulah yang kamu dapatkan. Berbagai perdebatan diatas lah yang membuat penelitian ini signifikan dalam menerjemahkan sikap netralitas politiknya Muhammadiyah harus menghadapi berbagai faksionalisasi yang ada dalam tubuh internalnya sendiri. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan besar tentang “*Bagaimana Sikap Netralitas Politik Elektoral Muhammadiyah?*” Adapun pertanyaan turunan adalah: a. Bagaimana bentuk netralitas politik elektoral Muhammadiyah ?, b. Mengapa terjadi deviasi sikap politik Pimpinan Muhammadiyah lokal terhadap putusan resmi Pimpinan Muhammadiyah Pusat pada Pemilu ?

KERANGKA TEORITIS

Pembahasan tentang elite dalam kerangka teoritik ini merujuk pada makna yang telah dikonsepsikan oleh Putnam,⁷ Pareto, dan Mosca. Menurut Putnam, elite merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Elite memiliki posisi strategis dalam sebuah struktur sosial dan organisasi karena para elite inilah yang memberikan kebijakan atau motif bagi sebuah tindakan organisasi. Dalam memahami sebuah keputusan kolektif dilaksanakan bersama, Putnam membagi tiga model analisis elite, yakni analisis posisi, analisis reputasi dan analisis keputusan.⁸ Analisis posisional menempatkan elite sebagai kelompok yang berada pada posisi struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat. Analisis reputasional memposisikan elite sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan suatu organisasi, sekalipun ia tidak berada dalam struktur organisasi atau dalam posisi informal dalam masyarakat. Analisis keputusan memposisikan elite sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dalam organisasi, sehingga ide-ide dan pemikirannya dapat dijadikan sumber atau preferensi bagi keputusan organisasi. Dengan kata lain elite diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.⁹

Menarik untuk memperbincangkan bagaimana sikap politik elite Islam, terutama pasca reformasi karena dari dulu hingga sekarang isu tentang bagaimana politik islam (islam substantif) dan islam politik (islam formalis) belum menemukan titik temu yang bisa mendamaikan kedua kutub politik islam ini. Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana Muhammadiyah menentukan kebijakannya dalam era pasca reformasi ditengah kecenderungan ekspresi umat Islam yang masih belum berdamai antara islam politik dan politik islam. Penulis mengambil sikap dalam penelitian ini bahwa semua pemikiran dan pergolakan antara dua kutub tersebut adalah merupakan hasil dan reproduksi pemikiran dari para elite-elite islam yang ada di Indonesia. Dalam mengkategorisasikan sikap politik elite, digunakanlah tesis tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu sikap inklusif dan sikap eksklusif. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekadar substansi) daripada simbol. Sedangkan sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada

⁷ Putnam, Robert D (2001). "Studi Perbandingan Elit Politik" dalam Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. GAMA Press. Yogyakarta, Hal. 80

⁸ Ibid Hlm 91

⁹ Ibid Hlm, 80- 83

substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai sikap politik di kalangan elite menengah Muslim di Indonesia.

Teori Faksionalisasi elite digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai faksi-faksi yang terbentuk pada saat Pemilihan Presiden 2014. Menurut Paul G Lewis terjadinya faksionalisasi dalam sebuah organisasi dapat dipahami sebagai sebuah pola yang bersifat sementara dan taktis. Faksi ataupun kelompok yang bersifat sementara dan taktis tersebut tidak bertahan lama dan hanya isu-isu tertentu merupakan ciri-ciri organisasi modern.¹⁰ Faksionalisasi dalam sebuah organisasi pada awalnya disebabkan kontrol pimpinan yang lemah yang berkembang pesat dan terkonsolidasi yang kemudian melemahkan kesatuan dan kekompakan dalam organisasi. Menurut Belloni, penyebab terjadinya faksionalisasi tidak hanya disebabkan oleh kontrol pimpinan yang lemah namun juga disebabkan oleh tiga kategori.¹¹ *Pertama*, faksi yang terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik. Faksi model ini tidak didasarkan pada ikatan yang bersifat formal. *Kedua*, faksi yang terbentuk melalui pola patron-klien. Faksi model ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan individu, yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu organisasi yang mempunyai basis pendukung yang jelas. *Ketiga*, faksi yang formal dan terorganisir. Faksi jenis ini memiliki kejelasan berupa nama resmi dan memiliki kesekretariatan yang jelas beserta program-program yang rutin dan tersendiri.

Peneliti mendasarkan bagaimana proses dalam pengambilan keputusan dalam Muhammadiyah dengan menggunakan teori agen. Bagaimana tarik menarik kepentingan antara aktor-aktor pengambil keputusan dengan keputusan organisasi Muhammadiyah bisa menemukan titik temu, di sinilah yang akan menjadi kajian analisa keagenan dalam Muhammadiyah. Hasil dari pilihan agen karena *bounded rationality* adalah agen dalam mengambil keputusan bukan memilih yang optimum tetapi hanya yang memuaskan. Daripada mempertimbangkan semua alternative dari yang paling disukai sampai yang tidak, agen hanya mencari sampai sebuah alternatif yang dianggap cukup baik. Pengambilan keputusan yang aktual, oleh karenanya bukanlah sebuah proses yang komprehensif untuk mencari sebuah pemecahan optimal. Tindakan tersebut merupakan proses yang berlangsung sedikit demi sedikit dimana agen menilai pilihan-pilihan sampai ditemukan yang memenuhi tingkat penerimaan yang minimum. Jika tingkat tersebut telah dicapai, maka pencarian itu

¹⁰ Paul G Lewis, *Political Parties in Post-Comunist Eastern Europe* (New York: Routledge, 2000). Hlm. 116

¹¹ *ibid*

berhenti dan pilihan dibuat. Rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) tersebut memunculkan sikap *satisficing* (bekerja dengan cukup baik dan cukup memuaskan saja) pada pengambil keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative methods*) yang mengacu pada berbagai teknik dalam penelitian; penelitian partisipatif, wawancara intensif secara personal, proses observasi serta *focus group discussion* (FGD) guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama, serta kita dapat menemukan sikap tegas dari para informan tersebut.¹² Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuannya, menjelaskan secara komprehensif tentang sikap politik elite Muhammadiyah pada Pemilu 2014 dalam merespon proses demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Unit analisa dalam penelitian ini adalah sikap politik dari individu-individu elite Muhammadiyah dalam merespon isu Islam dan Politik, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana para elite Muhammadiyah mengaktualisasikan dirinya dalam Pemilu 2014. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terdiri dari Pengurus Pusat Pimpinan Muhammadiyah. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland sebagaimana dikutip ulang oleh Moleong,¹³ sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder, meliputi dokumen dan lain-lain.

Analisa dalam penelitian ini merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2006). Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah : a. Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul dibuatkan transkripnya, yakni dengan cara menyederhanakan informasi yang terkumpul ke dalam bentuk tulisan yang mudah untuk dipahami. b. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

¹² David Marsh dan Gerry Stoker. *Theory and Methods in Political Science*. (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002). Hlm. 197

¹³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm. 157

penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. c. Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana sikap politik Muhammadiyah dari masa ke masa di Indonesia. Penyajian data yang sudah di tafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat deskriptif dan naratif. d. Penarikan kesimpulan; Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan.

NETRALITAS ELITE POLITIK MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK ELEKTORAL

Netralitas politik Muhammadiyah yang selama ini telah terjaga dan terimplementasi sebagai sebuah kebijakan organisasi yang final, tetapi dalam perjalanan panjang sejarah Muhammadiyah mengalami berbagai persoalan yang selalu menuntut ijtihad-ijtihad politik baru dari para elite nya. Hal ini pun berlaku ketika Muhammadiyah dihadapkan pada pesta demokrasi pada tahun 2014 ini, sudah diketahui bahwa Muhamamdiyah sejak pemilu tahun 2004, 2009 mengalami kegagalan dalam menempatkan strategi politiknya. Sehingga memunculkan sikap yang konfrontatif antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah (utamanya Din Syamsudin) dengan Presiden RI (Era-Susilo Bambang Yudhoyono), sikap kritis ditunjukkan Muhammadiyah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitupun juga sebaliknya representasi dari Muhammadiyah tidak nampak dalam Kabinet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua. Muhammadiyah hendak melakukan manuver politiknya pada Pemilu 2014, tetapi dalam kenyataannya manuver politik tersebut juga mengalami kegagalan dalam Pemilu 2014. Hampir sama dengan Pemilu 2004 dan 2009 Muhammadiyah tidak memiliki Menteri dalam Kabinet kepemimpinan Jokowi-JK tahun ini.

Diksi Netralitas politik dalam Muhammadiyah merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan betapa organisasi ini bisa menahan elite dan organisasinya untuk tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan, sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Meskipun demikian keberadaan Muhammadiyah dengan segala amal usahanya tidak bisa lepas dari kehidupan politik bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang sudah jauh semakin terbuka dan liberal dengan semangat kompetensi tinggi untuk menduduki post- post kekuasaan formal negara membuat sebagian elite Muhammadiyah sadar bahwa post-post tersebut harus diisi dan diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Tetapi disisi lain sebagian elite Muhammadiyah tidak mau menjadikan organisasi ini tercabik-cabik oleh berbagai kepentingan elitnya untuk merebut kekuasaan formal negara. Kenyataan

seperti inilah yang membuat Muhammadiyah harus merumuskan strategi-strategi (*ijtihad*) baru untuk merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang sangat strategis ini.

Mengutip pendapat James L. Peacock (1971), yang berpendapat bahwa Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai organisasi pembaruan Islam paling kuat di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia. Maka sikap politik atau sikap para elite pada pimpinan Muhammadiyah menarik untuk dilihat. Dengan semakin terpuruknya suara umat Islam dalam hal politik, Muhammadiyah tentu menjadi sebuah organisasi yang perlu dicermati bagaimana kiprah politik kebangsaannya dalam proses pemilu 2014. Modernitas Muhammadiyah salah satunya adalah tercermin dari sikap politik Muhammadiyah yang selalu mengambil posisi “netral” (tidak mendukung salah satu blok) dalam setiap pemilu yang digelar oleh negara ini. Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa sikap politiknya pada Tanwir Muhammadiyah di Samarinda; Din Syamsudin di dampingi oleh Sekretaris Umum Agung Danarto menyatakan sikap politik Muhammadiyah; Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan, tak akan berpihak pada salah satu pasangan capres. Namun Muhammadiyah tetap memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres pada 9 Juli mendatang.

Organisasi memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih secara cerdas pasangan capres dan cawapres yang dinilai mampu menunaikan cita-cita Muhammadiyah dan cita-cita nasional. Yakni membawa Indonesia maju, adil dan makmur. Din menyampaikan, kriteria calon pemimpin nasional berdasarkan hasil keputusan Tanwir Muhammadiyah 2012. "Amanat Muhammadiyah yang menjadi keputusan Tanwir 2012 tentang kriteria pemimpin yang diperlukan bangsa ini di masa mendatang yakni, harus mampu menjadi pemimpin pencipta solidaritas yang mengayomi seluruh elemen bangsa. Sebab dia bukan presiden milik partai politik pengusung tetapi presiden bangsa Indonesia," katanya. Presiden ke depan, lanjut Din, juga diharapkan menjadi pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Termasuk berani mengambil risiko. "Kriteria pemimpin ke depan yang juga menjadi harapan Muhammadiyah. Yakni yang memiliki komitmen moral khususnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme."¹⁴

¹⁴ Soal Pilpres, Din : Muhammadiyah Tidak Berpihak, diakses dalam (Republika.co.id, 24 Mei 2014, 22:03 WIB)

Penyataan resmi sidang tanwir diatas dibacakan Agung Danarto, sekretaris umum PP Muhammadiyah, organisasi Islam modernis ini menyatakan netral dalam pilpres nanti. Warga Muhammadiyah dipersilakan memberikan suara sesuai dengan keputusan dan pilihan hati nurani masing-masing. Pernyataan “memberikan kebebasan” kepada semua anggotanya merupakan letak dimana celah ini dimanfaatkan oleh para elite muhammadiyah untuk mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014. Sehingga perlu ditegaskan sekali lagi oleh Haedar Nashir bahwa sikap politik masing-masing pimpinan dan elite Muhammadiyah merupakan sikap individu bukan sikap organisasi Muhammadiyah. Hal ini sangat tegas dituturkan oleh Haedar Nashir; “Semua pernyataan yang diucapkan oleh tokoh atau anggota Muhammadiyah, termasuk yang ada dalam iklan pasangan calon presiden, sepenuhnya menjadi sikap pribadi yang bersangkutan, bukan sikap organisasi. "Sebagai sikap pribadi tentu hak setiap warga negara dan hak setiap anggota (Muhammadiyah). Anggota Muhammadiyah relatif cerdas dan dewasa dalam menyikapi setiap perkembangan politik.

Mereka bisa membedakan mana yang menyangkut kepentingan individu dan mana yang menyangkut organisasi. Mereka tidak akan mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. "Selama ini ada dua hal normatif yang menjadi garis kebijakan Muhammadiyah di dalam menghadapi setiap pergantian presiden. Pertama, Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah tidak dalam kapasitas untuk menentukan sikap politik praktis, baik dalam pemilu legislatif maupun presiden. Kedua kami selalu memberi petunjuk bahwa lembaga, amal usaha, institusi, dan fasilitas Muhammadiyah tidak digunakan untuk kampanye.¹⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Haedar Nashir mencoba memosisikan dirinya sebagai orang yang menjaga independensi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang jauh dari politik praktis. Selain Haedar Nashir tokoh-tokoh elite lainnya yaitu Agung Danarto, Dadang Kahmad, ketiga tokoh inilah yang mencoba membawa Muhammadiyah pada khittahnya. Dalam catatan biodatanya ketiga tokoh ini tidak pernah terlibat dalam pergumulan politik praktis, dan selalu mengambil sikap netral karena bertipe birokratis dalam pekerjaan dan latar belakang pendidikannya adalah birokratis. Muhammadiyah tidak ingin organisasinya terseret-seret kedalam perebutan

¹⁵ *Pernyataan Tokoh Muhammadiyah adalah Sikap Pribadi*, diakses dalam (nasional.kompas.com, Senin, 18 Mei 2009 | 20:08 WIB)

kekuasaan politik melalui pemilu. Tetapi di pihak lain Muhammadiyah berkepentingan untuk mengamankan Amal Usahnya yang sudah hampir menyamai dengan kepemilikan lembaga negara, mulai dari amal usaha; pendidikan, kesehatan, sosial, hukum. Dengan kondisi seperti ini maka Muhammadiyah menerjemahkan sikap politik netral menjadi sangat terbuka bagi para elitnya untuk menafsirkan sikap netral tersebut.

Faksionalisasi dalam tubuh Muhammadiyah yang terjadi pada Pilihan Presiden 2014 akan dianalisa dengan menggunakan teori faksionalisasi elite dengan meminjam istilah faksionalisasi dalam partai politik, sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan mendasar antara partai politik dengan organisasi penekan atau kelompok kepentingan (Muhammadiyah) adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara untuk mencapai kekuasaan.¹⁶ Fenomena terjadinya faksionalisasi elite didalam internal Muhammadiyah sangat terlihat pada pemilihan presiden 2014, kebijakan politik netralitas Muhammadiyah memiliki "*muly tafsir*" sehingga memunculkan sikap yang berbeda-beda dari masing-masing elite pimpinan Muhammadiyah. Pemilu presiden 2014 menunjukkan kepada publik bahwa walaupun dalam keputusan formalnya sebagai organisasi sosial keagamaan Islam Muhammadiyah netral dalam politik, tapi banyak aktor-aktor yang mendukung secara individu ataupun secara basis pendukungnya untuk menjadi pendukung salah satu calon presiden.

Faksi-faksi dalam tubuh internal elite Muhammadiyah terklasifikasi kedalam beberapa ; *pertama*, faksi "Pandangan Politik" yang terbentuk berdasarkan persamaan pandangan terhadap isu-isu politik. Faksi model ini tidak didasarkan pada ikatan yang bersifat formal. Terkait faksi dalam pandangan politik ini dalam tubuh Muhammadiyah terdapat dua faksi utama; yaitu faksi moderat dan faksi inklusif. Faksi inklusif dalam tubuh Muhammadiyah terdapat nama-nama seperti Amin Rais, Malik Fadjar, Dahlan Rais, Sukriyanto AR. Tokoh-tokoh ini tidak ingin terjebak pada "*politik gincu*" yang sebenarnya tidak ada manfaat bagi kebaikan negeri ini. Dalam kelompok ini ada tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsudin dan Hajriyanto Y. Thohari. Yang ke-dua yaitu faksi moderat yang diisi oleh Yunahar Ilyas, Muhammad Muqoddas, Goodwil Zubir, Abdul Mu'ti serta Agung Danarto. Selain berbagai tokoh diatas ada juga Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, Munir Mulkhan, Haedar Nashir, Syafiq Mughni dan Bambang Sudibyo.

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism, 2011). Hlm.3

Kedua, faksi “*Patron-Klient*” yang terbentuk melalui pola patron-klien dari para elite yang memiliki apresiasi lebih atau kepentingan terhadap perebutan kekuasaan yang berlangsung. Faksi model ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan individu, yaitu persaingan tokoh-tokoh berpengaruh dari suatu organisasi yang mempunyai basis pendukung yang jelas. Ada tiga faksi utama terkait *patron klient* dalam tubuh Muhammadiyah dalam menggarungi pemilu Presiden 2014. Faksi-faksi elite Muhammadiyah dalam tubuh Muhammadiyah; pendukung Jokowi-JK, pendukung Prabowo-Hatta, pendukung Khittah Muhammadiyah. Faksi pendukung Jokowi-JK digawangi oleh Ahmad Syafii Maarif dan Abdul Munir Mul Khan, kedua tokoh ini memiliki kedekatan yang sangat erat dengan kubu Jokowi dan JK. Disisi lain ada faksi pendukung Prabowo-Hatta yang di gawangi oleh Amin Rais, sebagai pendiri sekaligus dewan pembina Partai Amanat Nasional (PAN). Amin Rais menjadi pendukung Prabowo-Hatta karena Hatta merupakan calon wakil presiden dari Partai Amanat Nasional, sehingga kedekatan Amin dengan Muhammadiyah di manfaatkannya untuk dapat meraih dukungan dan simpati dari warga Muhammadiyah.

Ketiga, faksi “Ter-organisir” yang terjadi dalam level praksis juga muncul Relawan Matahari Indonesia (RMI) dan Surya Madani Indonesia (SMI). Faksi ini terbentuk secara formal dan terorganisir, faksi jenis ini juga memiliki kejelasan berupa nama resmi dan memiliki kesekretariatan yang jelas beserta program-program yang rutin dan tersendiri. Sebagian warga Muhammadiyah yang mendukung koalisi Indonesia Raya atau koalisi Merah-Putih itu bahkan mendeklarasikan dukungan dalam wadah yang bernama Surya Madani Indonesia (SMI). Pendirian SMI itu sebetulnya merupakan reaksi terhadap kelompok serupa yang didirikan oleh warga Muhammadiyah untuk mendukung Jokowi-JK, yaitu Relawan Matahari Indonesia (RMI). Wadah RMI ini didirikan diantaranya oleh Izzul Muslimin (Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah) dan Abd Rohim Ghazali (Mantan Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

BENTUK NETRALITAS POLITIK MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sudah memiliki posisi yang jelas, yaitu memilih untuk bersikap netral. Keputusan ini bahkan secara resmi telah tertuang dalam *Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014* yang dikeluarkan Muhammadiyah pada Tanwir di Samarinda 23-25 Mei lalu. Dalam Maklumat itu Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih pasangan capres/cawapres yang memenuhi tujuh kriteria, yaitu: religius, negarawan, *decisive*,

mampu mengelola negara dengan baik, mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara, *strategic*, dan *committed*. Pada masa kepemimpinan M. Din Syamsuddin (2005-2015), prinsip netralitas itu juga menjadi pilihan resmi meski ia menggunakan strategi dan slogan yang berbeda dari Syafii Maarif, yaitu “menjaga kedekatan yang sama” dengan semua partai politik.

Sikap politik Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan capres dari partai politik dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, harus dibaca secara mendalam. Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan terkait dengan sikap politik Muhammadiyah, sebagaimana di katakan oleh Zuly Qodir *Pertama*, Muhammadiyah menempatkan posisi semua parpol yang mengusung capres-cawapres sama saja. Mereka tak punya hubungan langsung dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama tersebut. Dengan memosisikan diri netral, Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai *king maker* suara umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar. *Kedua*, politik tinggi Muhammadiyah, yakni politik kebangsaan. Perilaku politik Muhammadiyah bukanlah perilaku politik dukung mendukung pasangan capres- cawapres pada Pilpres 9 Juli.

Elite pimpinan Muhammadiyah memosisikan organisasinya benar-benar sebagai penyangga kekuatan *civil* Islam Indonesia yang harus didorong dan mendukung perkembangan masyarakat Islam yang toleran, humanis, dan inklusif, bukan karakteristik Islam Indonesia yang penuh kekerasan dan ancaman sehingga menakutkan sebagian umat Islam minoritas dan umat agama lain yang jumlahnya juga minoritas. Muhammadiyah di era dasawarsa ini didorong menciptakan dan mengampanyekan Islam moderat sebagai genre Islam Indonesia. Karena itu, sikap politik Muhammadiyah yang disampaikan Din harus dipahami sebagai bagian penting Muhammadiyah dalam menjaga khittah Muhammadiyah yang sejak awal tak diagendakan jadi "gerakan politik praktis" dan sebagai parpol. Namun, Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam yang mengemban amanah “*Islam rahmatan lil alamin*” dan membangun komunitas masyarakat *baldatun thayibatun warabun ghofur*. Sikap netral yang disampaikan Din sekaligus sebagai ”sikap netral yang politis”. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting sebagai bagian dari gerakan civil Islam Indonesia yang selalu berupaya mengampanyekan perilaku politik beradab. Perilaku politik beradab Muhammadiyah tidak hanya mengejar keuntungan material dan kekuasaan, tetapi juga terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku santun beretika dalam menjalankan tindakan politik praktis.

Berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK menjadi menarik dalam pembahasan ini, apalagi setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama). Walaupun banyak media yang menyatakan ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pemahaman kader inti dalam Muhammadiyah adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satu-satunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Dunia politik bersifat transaksional, ketika Muhammadiyah tidak menyumbang suara maka dia juga tidak mendapatkan kue kekuasaan, tetapi dalam perjalanan seperti yang dibahas diatas muhammadiyah melalui Ahmad Syafii Maarif dan Relawan Matahari Indonesia mendukung dan jadi tim sukses nya Jokowi-JK. Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo- Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye. Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir. Ini dapat dilihat dari lembaga CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat sehingga membuat nama Rizal Sukma tercoret dari daftar menteri.

Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah

Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya. Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (*high politics*). Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional.

DEVIASI SIKAP POLITIK PIMPINAN MUHAMMADIYAH LOKAL TERHADAP PUTUSAN RESMI MUHAMMADIYAH PADA PEMILU

Keterlibatan Muhammadiyah dan politik sama sekali bukan hal yang baru, namun demikian untuk memahami Muhammadiyah sebagai entitas politik *an sich* tentu kurang tepat. Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak pernah menampilkan dirinya berwajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa terlibat dalam politik. Peta dan dinamika politik Muhammadiyah yang berubah menggiring pilihan-pilihan kelembagaan berbagai ormas Islam untuk berubah dalam mensikapi perkembangan politik yang semakin terbuka dan terdesentralisasi ke daerah. Terbukanya kran politik memungkinkan secara organisatoris terlibat dalam proses elektoral di daerah sebagai kebutuhan strategis dakwah maupun sebagai korban tarik menarik kepentingan elite politik tertentu atau bahkan kedua fenomena itu terjadi dalam Muhammadiyah di daerah. Salah satu perubahan filosofi berpolitik Muhammadiyah adalah dari “menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik” menjadi “menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik”. Ungkapan sederhana ini memiliki dampak yang serius bagi perkembangan pola hubungan Muhammadiyah dan politik di daerah-daerah tertentu.

Pada tataran praksis, pemilu legislatif dan eksekutif pada tingkat lokal (termasuk nasional) masih belum menemukan formula yang seragam, sehingga penting untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa kebutuhan. Pertama, setidaknya membutuhkan dukungan logistik yang memadai. Tanpa harus dikendalikan oleh broker atau pemilik modal. Jika ini terjadi, maka harga politik yang harus dibayar cukup mahal. Bila terpilih, kompensasi untuk broker atau pemilik modal bisa mengendalikan kebijakan dalam pemerintahan atau legislasi. Kedua, jaringan dan dukungan basis massa, terutama ditingkat grassroad. Ketiga, jaringan dan dukungan emosional pada etnisitas. Sejak daerah

diberikan otoritas lewat otonomi daerah, politik identitas menyeruak dan polarisasi komunitas, terutama menjelang, selama proses, dan pasca pemilu tak terhindarkan baik secara terbuka atau pun samar-samar. Dukungan politik identitas diarahkan untuk mem-back up kebutuhan dan dukungan yang lain.

Apa yang terjadi dalam kasus Muhammadiyah di Kabupaten Maros dan Kabupaten Sleman merupakan fenomena elite untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal (*office seeking*). Perdebatan tentang terjunnya elite politik yang merupakan kader Muhammadiyah kedalam perebutan kekuasaan tentu tidak dapat diartikan dalam konotasi negatif. Muhammadiyah sebagai organisasi *civil society* peran high politics atau politik alokatif Muhammadiyah dapat diterjemahkan bahwa organisasi ini menjadi wadah “produsen” pemimpin yang tanggung dan berkarakter. Pragmatisme politik Muhammadiyah merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh sebagian elite Muhammadiyah untuk menjadi menarik untuk dikontekstualisasikan pada peluang demokratisasi dan desentralisasi di aras lokal.

Pengalaman-pengalaman di daerah yang mencoba memadukan antara *low politics* dan *high politics* atau politik alokatif dan politik konstitutif menjadi kekuatan dan hal baru dari Muhammadiyah dalam perjuangan politiknya. Jarak politik menjadi hal yang paling jelas dan masuk akal untuk menjelaskan bagaimana ijihad politik Muhammadiyah di level nasional dan lokal menjadi berbeda, karena keseharian Muhammadiyah di level lokal mempunyai urusan dengan pemerintahan dimana segala keputusan politik dapat dan perlu dinegosiasikan. Berbeda dengan level politik nasional, jarak teritorial dan jarak politik yang tidak terjangkau mengakibatkan orientasi politik menjadi kurang penting di level pusat Muhammadiyah.

Perilaku politik elektoral elite dan warga Muhammadiyah lebih dipengaruhi oleh kebijakan organisasi daripada hanya sekedar keterlibatan individu dalam perjuangan politik kekuasaan (Bush, 2014). Dalam konteks ini maka secara organisasi, perilaku politik organisasi Muhammadiyah dalam pemilihan umum ditingkat lokal seperti Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman mendukung pencalonan kepala daerah dan juga dukungan kelembagaan terhadap keputusan “konvensi” internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan Afnan Hadikusumo sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mendekati motif sebagai *office-seeking*. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, tidak ada pilihan lain bahwa proses desentralisasi kekuasaan

semakin nyata, dimana kepala daerah memiliki otoritas kekuasaan yang jauh lebih besar daripada pemerintahan pusat. Logika tersebut menjadikan Muhammadiyah tidak lagi bisa mengandalkan sikap netralitas politik Muhammadiyah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kondisi itulah yang membuat Muhammadiyah harus mampu menyiapkan kader-kader ditingkat lokal yang handal untuk berkomunikasi dan berdialog secara langsung dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini bisa terjadi dengan konsolidasi organisasi dan pemanfaatan modalitas jaringan kader pada berbagai tingkatan.

KESIMPULAN

Sikap politik Muhammadiyah adalah sikap dan pandangan politik dari para elite Muhammadiyah yang terejawantahkan dalam keputusan organisasi Muhammadiyah. Elite Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, dengan meminjam analisa Robert D. Putnam, elite Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kader Muhammadiyah yang menjabat secara struktural di Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki pengaruh terhadap setiap kebijakan organisasi. Selain itu dalam penelitian ini juga memasukkan elite yang memiliki reputasi dalam Muhammadiyah tetapi sudah tidak menjabat dalam kegiatan struktural Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Elite informal ini didominasi oleh mantan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki reputasi dan dukungan massa dalam Muhammadiyah.

Kebijakan politik Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil, selain itu juga bagaimana konstelasi kekuatan elite kolektif kolegal Muhammadiyah didominasi oleh para elite yang memiliki pandangan politik seperti apa. Garis kebijakan politik Muhammadiyah jika dikelompokkan berdasarkan perjalanan sejarahnya, bisa diklasifikasikan ke dalam tiga model; 1. Formal-langsung, 2. Personal-tidak langsung, dan 3. Netral (Netralitas aktif dan pasif). Pola hubungan Muhammadiyah dan politik pada Pemilu 2014 tidak lepas dari peran-peran elite Muhammadiyah pada kepemimpinan 2010-2015. Netralitas politik Muhammadiyah yang selama ini selalu mejadi jargon Muhammadiyah atau merupakan pilihan terbaik yang harus diambil oleh organisasi sosial keagamaan memiliki berbagai wujud dalam perjalanannya. Mengacu pada kerangka teori dari Belloni maka, faksionalisasi dalam tubuh Muhammadiyah juga terlihat sangat jelas dalam Pilihan Presiden 2014. Dimana ada tiga model faksionalisasi; a. Faksi "pandangan politik", terkait isu-isu mendasar bagaimana pola hubungan Islam dan politik, b. Faksi

“Patron-klient”, mengutamakan kedekatan informal antara elite Muhammadiyah dengan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berebut kuasa dalam Pemilu, c. Faksi “terorganisir”, adanya dua lembaga yang terstruktur dengan jelas dalam tubuh Muhammadiyah yang merupakan bentukan dari massa Muhammadiyah yang terorganisir.

Peran elite informal dalam Muhammadiyah dalam memainkan peran politiknya merupakan sebuah strategi dari Muhammadiyah untuk menjaga dan mempertahankan netralitas politiknya. Elite informal dalam Muhammadiyah merupakan orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab struktural kepada organisasi Muhammadiyah, tetapi memiliki simpatisan dan loyalis dalam orang-orang Muhammadiyah. Khittah Politik Muhammadiyah merupakan sebuah struktur pembatas bagi para elite formal Muhammadiyah, dan ini terbukti selama ini Muhammadiyah masih eksis dengan jargon netral dalam berpolitik praktis. Khittah menjadi pilihan yang memberikan *win-win solution* bagi para elite formal Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan sikap politiknya. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas dan pembingkai Muhammadiyah agar tetap berada di koridornya yakni bergerak di bidang dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan, serta tidak bergerak dalam politik-praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik.

Ketika dipotret dari level elite Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa ke-13 elite pimpinan tersebut berhasil dan mampu membawa Muhammadiyah di level nasional menjadi sebuah organisasi yang jauh dari politik kekuasaan. Tetapi ketika dipotret pada level lokal/daerah logika kelembagaan netral Muhammadiyah menampakkan fakta yang berbeda. Potret Kabupaten Sleman dan Kabupaten Maros menunjukkan bahwa Muhammadiyah di level lokal secara organisasi memberikan dukungan penuh kepada kader-kadernya untuk dapat menduduki jabatan politik dari sebuah pemerintahan. Jabatan eksekutif Bupati dan jabatan Dewan Perwakilan Daerah menjadi jabatan strategis yang dapat diraih oleh Muhammadiyah di daerah. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tercermin dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013, atau lebih dikenal dengan SK-PP: 41. Surat Keputusan yang diterbitkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada 26 Maret 2013 merupakan sebuah kebijakan yang mengatur bagaimana pola hubungan Muhammadiyah di daerah ketika berhubungan dengan politik praktis. Tetapi masing-masing daerah memiliki keunikan dan memiliki elite yang otonom dengan kepentingan dan ijtihadnya sendiri.

Sehingga jarak teritorial dan jarak politik mempengaruhi bagaimana Muhammadiyah Pusat dan Muhammadiyah Daerah dalam menerjemahkan ijtihad dan netralitas politik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bottomore, TB. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Terj. Abdul Harris dan Sayid Umar. Akbar Tandjung Institute. Jakarta
- Boy ZTF, Pradana. 2009. *Para Pembela Islam, Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*. Jakarta : Gramata.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative inquiry and research design : Choosing among five traditions*. London : Sage.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y (eds). 1994. *Handbook of qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Goodin, R. 1996. "Institutional and Their Design". In R. Goodin (ed.) *The Theory of Institutional Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Efendi, David. 2010. *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 2009*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIPOL UGM.
- Jainuri, Achmad. 1999. *The Formation of the Muhammadiyah's* Hart, Oliver. 1990. "An Economist's Perspective on the Theory of the Firm," dalam *Organization Theory: From Chesters Bernard to the Present and Beyond*, edited Oliver E. William, New York: Oxford University Press.
- Ideology 1912–1942*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- Jurdi, Syarifuddin. 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kearns, Kevin, 1996. *Managing for Accountability: Preserving the Public Trust in Public and Non-profit Organizations*. San Francisco: Josey Bass Publisher.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elite dalam Masyarakat Modern*, terj. Zahara D Noer. Jakarta : Rajawali Press.

- Lewis, Paul G. 2000. *Political Parties in Post-Comunist Eastern Europe*. New York: Routledge.
- Lowndes. Vivian. 2002. "Institutionalism", in David Marsh and Gerry Stoker (eds.). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave Macmillan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- March, James G. and Olsen J. 1989. *Rediscovering Institutions*. New York: Free Press.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2002. *Theory and Methods in Political Science*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nashir, Haedar. 2011. *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Putnam, Robert D. 2000. *Studi Perbandingan Elit Politik dalam Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Qodir, Zuly. 2010. *Muhammadiyah Studies : Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Rahardjo, M. Dawam. 2010. *Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang Arah Pembaruan*. Jakarta: Paramadina & LSAF.
- Robins, Stephen P. 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, NY: Prentice-Hall.
- Roemer John E. 2006. *Political Competition: Theory and Application, 5th Ed.* Harvard University Press.
- Stake, Robert E. 1978. *The Case Study Method in Social Inquiry*. University of Illinois : Urbana-Champaign.
- Suwarno. 2010. *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara. Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Thohari, Hajriyanto Y. 2005. *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*. Jakarta : PSAP.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga*

di Indonesia. Bandung: Mizan.

Yin, Robert K. 1995. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Akasara.